

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh

Fatmawati¹, *Zikriatul Ulya², Abdul Hamid³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Langsa

*Penulis Koresponden: zikriatululya@iainlangsa.ac.id

ABSTRACT

Economic growth is an indicator of the success of development implementation which can be used as a macro benchmark and changes in Gross Regional Domestic Product (GRDP) in a region. GRDP is the amount of added value produced by all business units in a region. The higher the economic growth of an area indicates the better the economic activity in that area. This research aims to determine the influence of PAD, Capital Expenditures, Oil and Gas Profit Sharing Funds on economic growth in Aceh, with the selected year starting from 2011-2020. This research uses quantitative methods and the data used is secondary data in the form of the Aceh Government Financial Report and the General Ministry of Finance. The data analysis method uses multiple linear regression analysis. The results of the research show that local revenue has a positive and significant effect on economic growth in Aceh with a significance value of $0.009 < 0.05$ and a value of t_{count} of $3.778 > t_{table}$ I value of 1.8945. Capital expenditure has no significant effect on economic growth in Aceh with a significance value of $0.464 > 0.05$ and a t value of $-0.783 < t_{table}$ value of 1.8945. Oil and gas profit sharing has no significant effect on economic growth in Aceh with a significance value of $0.521 > 0.05$ and a t_{count} value of $-0.682 < t_{table}$ value of 1.8945. The results of the F test (simultaneous) show that the significance value of F is $0.001 < 0.05$ and the F value is $24.832 > 19.35$ indicating that there is a positive and significant influence of PAD, Capital Expenditures, Oil and Gas Profit Sharing on economic growth in Aceh.

star_border

Keywords: PAD, Capital Expenditures, Oil and Gas Profit Sharing Funds and Economic Growth in Aceh

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjadikan tolak ukur secara makro dan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi pada daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, Belanja Modal, Dana Bagi Hasil Migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dengan tahun yang diangkat yakni mulai dari tahun 2011-2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan Jenderak Kementerian Keuangan. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dengan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ dan nilai dari t_{hitung} $3,778 >$ nilai t_{tabel} I $1,8945$. Belanja Modal tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dengan nilai signifikansi $0,464 > 0,05$ dan nilai dari t_{hitung} $-0,783 <$ nilai t_{tabel} $1,8945$. Bagi hasil migas tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dengan nilai signifikansi $0,521 > 0,05$ dan nilai dari t_{hitung} $-0,682 <$ nilai t_{tabel} $1,8945$. Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwasanya nilai

signifikansi F adalah $0,001 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 24,832 > 19,35$ menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan PAD, Belanja Modal, Bagi Hasil Migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Kata Kunci : PAD, Belanja Modal, Bagi Hasil Migas Dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh.

PENDAHULUAN

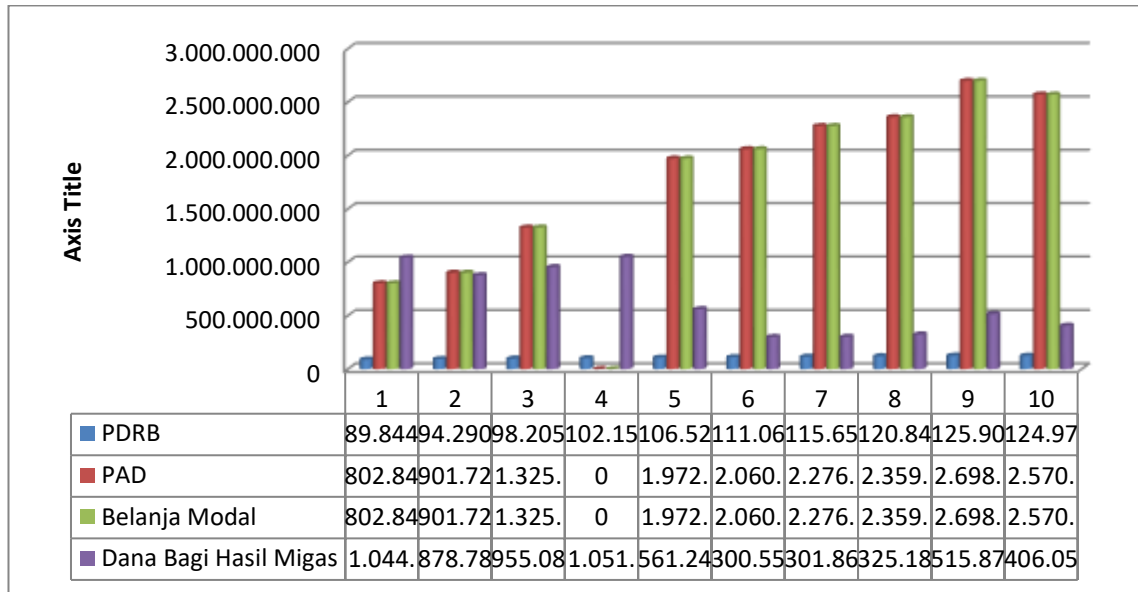
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjadikan tolak ukur secara makro dan dapat dicerminkan dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi pada daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Majid et al., 2017).

Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun (Romhadhoni, 2018). Pertumbuhan ekonomi Aceh juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal serta Dana Bagi Hasil Migas ketiga faktor ini mempengaruhi perekonomian aceh (Hakim, 2014).

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi berkembang dengan adanya perbaikan pada sektor ekonomi (Sadono Sukirno, 2013). Perkembangan PDRB Aceh dapat dilihat pada

Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Data PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Bagi Hasil Migas (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2011-2020

(Sumber: Data BPS Provinsi Aceh, Laporan Keuangan dan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022)

Gambar 1 menunjukkan bahwa bahwa PDRB Provinsi Aceh mengalami peningkatan sejak tahun 2011-2019. Rata-rata peningkatan PDRB sejak tahun 2011 hingga 2019 adalah 4 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan menjadi Rp 124.975.810 juta. Hal ini disebabkan karena adanya *coronavirus disease 2019*, penggunaan APBN yang tidak efektif sehingga mempengaruhi kebijakan moneter, dan tidak ada peningkatan daya tarik ekonomi kepada para investor.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan bagi hasil migas. Terkait dengan PAD, setiap daerah memiliki sumber daya tersendiri yang bisa digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, redistribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. PAD merupakan penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. PAD tersebut dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mulai dari 2011-2020. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebenarnya

merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi (Abrar, 2010).

Selain Pendapatan Asli Daerah, Belanja modal juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (*Permendagri No.13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2006).

Dalam Lampiran III PMK No. 101/PMK.02/2011 Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU). Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal (Erlina, 2013).

Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa belanja modal Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 belanja modal sebesar 1.473.983.448 tetapi pada tahun 2012 belanja modal turun menjadi 815.338.776, hal ini disebabkan karena pemerintah kurang dalam memberikan tindakan dalam mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya (Fajri, 2016). Kemudian mulai dari tahun 2013-2019 Belanja modal terus mengalami peningkatan hal ini menunjukkan semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah Aceh untuk melakukan pembangunan.

Selain Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal, Dana Bagi Hasil Migas (DBHM) juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Aceh. Dana Bagi Hasil Migas dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara rinci Alokasi Dana Bagi Hasil Migas diatur berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 Tentang dana perimbangan.

Dari grafik 1 di atas dapat dilihat bahwasannya data Dana Bagi Hasil Migas Aceh mulai dari tahun 2011-2020 cenderung mengalami penurunan yaitu seperti pada tahun 2011 DHB Migas sebesar 1.044.164.516 ribu rupiah kemudian mengalami penurunan selama dua tahun kedepan dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 1.051.034.591 ribu rupiah. Hal ini disebabkan karena dampak dari rendahnya harga minyak, dan daerah yang sering merasakan dampak dari rendahnya harga minyak yaitu Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat dan termasuk lah Provinsi Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) (Kuncoro, 2004). Kemudian mulai tahun 2015-2020 Dana bagi hasil Migas cenderung mengalami penurunan hal ini disebabkan Dana bagi hasil Migas belum dapat diandalkan karena sangat kecil. Aceh pernah mengalami masa kejayaan produksi migas dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2000an ketika masih berproduksinya kilang gas alam cair PT. Arun. Kilang Arun mengolah gas alam yang dipasok oleh Mobil Oil waktu itu. Terakhir Mobil Oil berganti nama menjadi Exxon Mobil dan mengakhiri kontrak lapangan Arun pada tahun 2018. Aceh hanya menerima dana pembangunan dengan skema “perimbangan keuangan”. Dengan skema tersebut jelas Aceh setiap tahunnya selalu menerima jumlah yang sangat kecil, karena konsep penyaluran dana dengan skema perimbangan adalah berdasarkan jumlah penduduk.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berbicara mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan (Halim, 2004).

PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Menurut Halim (2007) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi (Nasir, 2019).

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (Permendagri No.13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006). Dalam Lampiran III PMK No. 101/PMK.02/2011 Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU). Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal (Erlina, 2013).

Belanja modal adalah salah satu bentuk dari pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yaitu hubungan keduanya bisa diamati dari meningkatkan pelayanan publik yang merupakan tujuan utama dari otonomi daerah (Utami & Indrajaya, 2019).

DHB Migas

DBH migas adalah dana yang berasal dari penerimaan negara yang bersumber dari sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota maupun wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008).

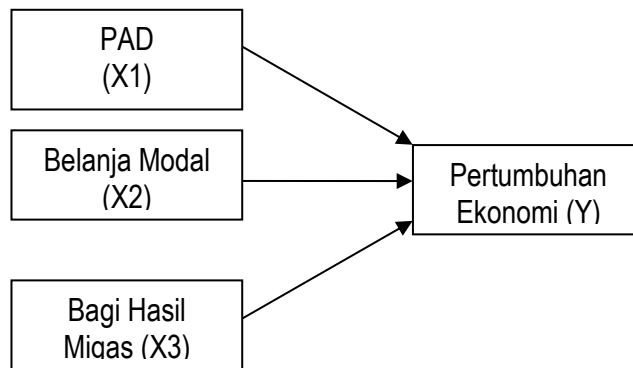
Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu perekonomian khususnya untuk menganalisis hasil pembangunan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan ekonomi di suatu daerah (Sukirno

Sadono, 2012;Kismawadi, 2023a). Pertumbuhan ekonomi dapat dipicu dengan semakin banyaknya infrastruktur dan perbaikannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Nugroho, 2010; Utami & Indrajaya, 2019).

Kerangka Teori

Adapun Kerangka teori dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Teori

Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_{a1}: PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
- H_{o1}: PAD tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
- H_{a2}: Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
- H_{o2}: Belanja modal tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
- H_{a3}: Bagi hasil migas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
- H_{o3}: Bagi hasil migas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
- H_{a4}: PAD, belanja modal dan bagi hasil migas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.
- H_{o4}: PAD, belanja modal dan bagi hasil migas secara simultan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan meneliti seberapa besar pengaruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*). Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016; Hamid et al., 2019). Untuk pengolahan data dibutuhkan data yang akurat maka dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, Jenderal Kementerian Keuangan dan waktu yang digunakan adalah 10 tahun terakhir yaitu 2011-2020, dengan tujuan untuk menguatkan data dari penelitian sebelumnya.

Horizon waktu terbagi menjadi dua yaitu studi *time series* dan studi longitudinal. Sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian disebut tuda one-shot atau *time series*. Sebuah studi yang data variabel terikatnya dikumpulkan pada dua atau lebih batas waktu untuk menjawab pertanyaan disebut longitudinal. Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini studi one-shot atau *time series*. Karena dalam penelitian ini data yang dikumpulkan hanya sekali yaitu data Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Bagi Hasil Migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2020 maka horizon waktunya one-shot atau cross *time series*. Alat analisis yang digunakan analisis regresi berganda, Uji asumsi Klasik terdiri dari Uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi. Selanjutnya uji parsial (uji T), Uji Simultan (Uji F), dan Uji Koefisien Detreminasi (R^2) (Fahriansah et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Model Jalur yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengn uji normality plot dengan melihat Tabel 1 pada P-Plot sebagai berikut:

Tabel 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03249809
Most Extreme Differences	Absolute	.193
	Positive	.193
	Negative	-.171
Test Statistic		.193
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

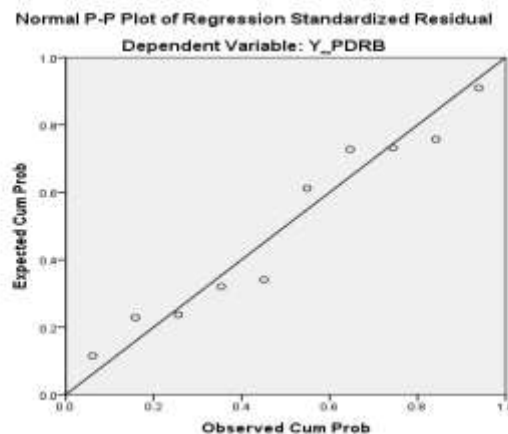
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil penelitian, 2024

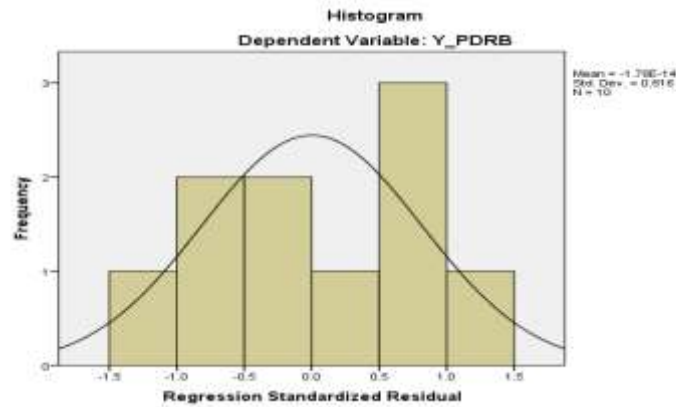
Berdasarkan pada Tabel 1 di atas pada uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov signifikan pada $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa metode regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Grafik p-plot sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik Normal Probability Plot

(Sumber: Hasil penelitian, 2024)

Dari grafik 3 di atas menunjukkan bahwa grafik normal *probability plot* terlihat titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya, garis ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Setelah melihat grafik P-Plot, selanjutnya dilakukan analisis terhadap grafik histogram. Adapun grafik histogram uji normalitas dapat dilihat sebagai gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 4. Grafik Histogram
(Sumber: Hasil penelitian, 2024)

Grafik histogram diatas membentuk lonceng dan tidak condong ke kanan atau ke kiri sehingga grafik histogram tersebut dinyatakan normal.

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi signifikan antara variabel bebasnya. Jika terdapat gejala multikolinieritas relatif sempurna, maka penafsiran lewat kuadrat terkecil menjadi tak tertentu dan variasi serta standar deviasinya menjadi tak terdefiniskan. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya penyimpangan mengenai ketepatan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Dari hasil analisis hipotesis diperoleh nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1_Pendapatan Asli Daerah	.185	5.398
X2_Belanja Modal	.336	2.973
X3_Dana Bagi Hasil Migas	.385	2.597

a. Dependent Variable: Y_PDRB
Sumber : Hasil penelitian, 2024

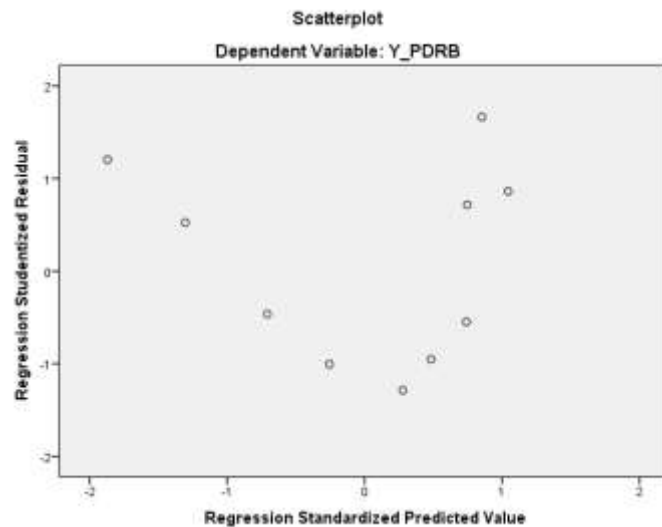
Berdasarkan Tabel di atas di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai *Tolerance* untuk variabel PAD sebesar 60,185/ > 0,10 dan nilai VIF sebesar 5,398 < 10, sehingga variabel PAD dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

2. Nilai *Tolerance* untuk variabel belanja modal sebesar $0,336 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,973 < 10$, sehingga variabel belanja modal dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
3. Nilai *Tolerance* untuk variabel DBH migas sebesar $0,385 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,597 < 10$, sehingga variabel DBH migas dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model jalur terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, sebaliknya jika berbeda disebut heterokedastisitas. Dengan pengujian menggunakan SPSS diperoleh hasil pada Gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 5. Grafik Hasil Uji Heterokedastisitas

(Sumber : Hasil penelitian, 2024)

Bedasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar secara merata baik di atas sumbu X ataupun Y, serta titik berkumpul di suatu tempat dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, karena variabel independen tidak saling mempengaruhi

Uji Autokorelasi

Persamaan regersi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut tidak layak dipakai prediksi. Ukuran dalam

menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.962 ^a	.925	.888	.03980	.583

a. Predictors: (Constant), X3_BHM, X2_BM, X1_PAD

a. Dependent Variable: Y_PDRB

Sumber : Hasil penelitian, 2024

Dari tabel di atas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 0,583. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai DW antara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dengan model regresi ini.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Hasil pengujian hipotesis nilai probabilitas (p-Value) dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.318	1.682		8.511	.000
	X1_Pendapatan Asli Daerah	.271	.072	.978	3.778	.009
	X2_Belanja Modal	-.048	.061	-.150	-.783	.464
	X3_Dana Bagi Hasil Migas	-.028	.041	-.122	-.682	.521

a. Dependent Variable: Y_PDRB

Sumber : Hasil penelitian, 2024

Dari tabel di atas maka persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 14,318 + 0,271X_1 - 0,048X_2 - 0,028X_3.$$

Persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 14,318 berarti apabila PAD, belanja modal dan DBH migas bernilai tetap maka PDRB sebesar 14,318.
2. Koefisien regresi variabel PAD menunjukkan pengaruh positif sebesar 0,271. Artinya, apabila PAD meningkat sebesar satu satuan maka PDRB akan meningkat akan

meningkat sebesar 0,271 persen dengan asumsi variabel belanja modal dan DBH migas tidak berubah.

3. Koefisien regresi variabel belanja modal menunjukkan pengaruh negatif sebesar -0,048. Artinya, apabila belanja modal meningkat sebesar satu satuan maka PDRB akan menurun sebesar -0,048 persen dengan asumsi variabel PDRB dan DBH migas tidak berubah.
4. Koefisien regresi variabel DBH migas menunjukkan pengaruh negatif sebesar -0,028. Artinya, apabila DBH migas meningkat sebesar satu satuan maka PDRB akan menurun sebesar -0,028 persen dengan asumsi variabel PDRB dan belanja modal tidak berubah.

Hasil Uji Parsial (T)

Uji T digunakan untuk menguji apakah secara individu variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesisnya yaitu:

Kriteria pengujian :

Jika nilai $t_{sig} > \alpha = 0,05$, maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jika nilai $t_{sig} < \alpha = 0,05$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima.

Adapun Hasil pengujian parsial (Uji T) dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.318	1.682		8.511	.000
	X1_Pendapatan Asli Daerah	.271	.072	.978	3.778	.009
	X2_Belanja Modal	-.048	.061	-.150	-.783	.464
	X3_Dana Bagi Hasil Migas	-.028	.041	-.122	-.682	.521

a. Dependent Variable: Y_PDRB

Sumber : Hasil penelitian, 2024

Dari Tabel di atas maka hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa variable pendapatan asli daerah yang diperoleh dari t_{hitung} $3,778 > t_{tabel}$ $1,8945$, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ berarti signifikan serta variable PAD memiliki nilai koefisien sebesar 0,271. Yang berarti apabila PAD naik satu satuan maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,271. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable PAD berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di aceh. Dengan demikian, maka H_{01} di tolak dan H_{a1} diterima.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa variable Belanja Modal yang diperoleh dari $t_{hitung} -0,783 < t_{tabel} 1,8945$, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,464 > 0,05$ berarti tidak signifikan serta variable Belanja Modal memiliki nilai koefisien sebesar $-0,048$. Yang berarti apabila Belanja Modal naik satu satuan maka pertumbuhan ekonomi turun sebesar $-0,048$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di aceh. Dengan demikian maka H_{02} diterima H_{a2} ditolak.

3. Pengaruh DBH Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa variable DBH Migas yang diperoleh dari $t_{hitung} -0,682 < t_{tabel} 1,8945$, maka dapat disimpulkan bahwa DBH Migas memiliki pengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,521 > 0,05$ berarti tidak signifikan serta variable DBH Migas memiliki nilai koefisien sebesar $-0,028$. Yang berarti apabila DBH Migas naik satu satuan maka pertumbuhan ekonomi turun sebesar $-0,028$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable DBH Migas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di aceh. Dengan demikian maka H_{03} diterima H_{a3} ditolak.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara serentak variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian :

Jika nilai $F_{sig.} > \alpha = 0,05$, maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika nilai $F_{sig.} < \alpha = 0,05$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima

Adapun Hasil pengujian simultan (Uji F) dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.118	3	.039	24.832	.001 ^b
	Residual	.010	6	.002		
	Total	.128	9			

a. Dependent Variable: Y_PDRB

b. Predictors: (Constant), X3_BHM, X2_BM, X1_PAD

Sumber : Hasil penelitian, 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat nilai Fhitung sebesar 24,832 dengan hasil signifikan 0,001. Maka hasil ini dapat dibandingkan dengan nilai ftabel sebesar 19,35 dengan menggunakan sig. 0,05. Sehingga hasil yang diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $24,832 > 19,35$ dengan nilai sig. $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa PAD, Belanja Modal dan DBH Migas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Dengan demikian maka hipotesis H_{a4} diterima.

Analisis Koefisien Determinasi

Dalam analisis ini terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi atau yang sering disebut dengan koefisien penentu, karena besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R^2), sehingga koefisien ini berguna untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun Hasil pengujian Koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil pengujian Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.962 ^a	.925	.888	.03980	.583

a. Predictors: (Constant), X3_BHM, X2_BM, X1_PAD

b. Dependent Variable: Y_PDRB

Sumber : Hasil penelitian, 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,888. Artinya, PAD, belanja modal dan DBH migas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebesar 88,8%, sedangkan sisanya 11,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas

perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau daerah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Dari hasil penelitian diketahui bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh, dimana dari hasil uji t menunjukkan bahwa variable pendapatan asli daerah yang diperoleh dari $t_{hitung} 3,778 > t_{tabel} 1,8945$, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ berarti signifikan.

Hal ini dikarenakan PAD merupakan gambaran keberhasilan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan di daerah-daerah tersebut terutama di provinsi aceh. hal ini dikarenakan bila PAD tinggi, pemerintah wilayah akan lebih mampu mengoptimalkan potensi PAD tersebut. Semakin meningkatnya PAD, maka akan semakin meningkat juga laju pertumbuhan ekonominya dikarenakan pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerah. Penelitian ini sesuai dengan teori keynesian yang menyatakan kenaikan pengeluaran/belanja pemerintah akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, maka akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2007:277). Jika teori keynesian ini dimasukkan unsur daerah, maka dapat dimaknai bahwa pada saat pendapatan suatu daerah meningkat yaitu PAD, secara otomatis pengeluaran mengalami kenaikan sehingga dengan meningkatnya pengeluaran maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan (Utami & Indrajaya, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mawarni, dkk (2013) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan atau penurunan tergantung dari seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam daerah karena digunakan untuk membiayai segala program-program yang direncanakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

perekonomian daerah (Mohammed et al., 2015). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari beberapa komponen dan mampu menambah nilai kekayaan bersih yang dimiliki daerah.(Antari & Sedana, 2018).

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Adanya pembentukan modal membuat permintaan terhadap barang dan jasa menjadi efektif, menciptakan efisiensi produksi di masa depan dengan adanya kemajuan teknologi. Dengan adanya belanja modal maka daerah dapat meningkatkan aset serta pembangunan. Dari analisis data diketahui bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh, dimana hasil uji t menunjukkan bahwa variable Belanja Modal yang diperoleh dari $t_{hitung} - 0,783 < t_{tabel} 1,8945$, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,464 > 0,05$ berarti tidak signifikan.

Hal ini dikarenakan belanja modal yang dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat langsung memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana belanja modal butuh waktu dalam prosesnya, mulai dari anggaran, kemudian pelaksanaan baru setelah itu dapat digunakan atau dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian belanja modal untuk pembangunan tidak selalu langsung dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian, seperti pembelian tanah untuk asset daerah, tidak langsung dibangun sarana dan prasarana sehingga harus menunggu untuk dibangun sarana dan prasarana baru setelah itu dapat digunakan.

Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi suatu negara dibentuk dari tiga unsur yaitu sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia dan akumulasi modal yang dimiliki (Arsyad, 2010:75). Menurut Harrod-Domar faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu pembentukan modal, pembentukan modal dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan (Arsyad, 2010:84). Belanja modal adalah salah satu bentuk dari pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yaitu hubungan keduanya bisa diamati dari meningkatkan pelayanan publik yang merupakan tujuan utama dari otonomi daerah. Menurut Rostow dan Musgrave (Mangkoesebroto, 1993:169) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran

pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi 3 tahap yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pemerintah daerah membangun sarana dan prasarana yang nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dipicu dengan semakin banyaknya infrastruktur dan perbaikannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Nugroho, 2010; (Utami & Indrajaya, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Siti Dini, dkk dewi dan dewa (2017) yang menyatakan bahwa Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian sebelumnya yang tidak sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Surtika, dkk (2021) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Dana bagi hasil migas merupakan bagi hasil pemerintah daerah dengan pusat dari hasil minyak dan gas bumi. Dari analisis data diketahui bahwa dana bagi hasil migas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dimana dari hasil uji t menunjukkan bahwa variable DBH Migas yang diperoleh dari $t_{hitung} -0,682 < t_{tabel} 1,8945$, maka dapat disimpulkan bahwa DBH Migas memiliki pengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil signifikansi sebesar $0,521 > 0,05$ berarti tidak signifikan.

Pada umumnya DBH migas yang diberikan dari pemerintah bertujuan untuk menandai keperluan daerah, namun dari hasil yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil migas belum dialokasikan secara maksimal pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan juga disebabkan oleh menurunnya lifting migas lantaran tidak mempunyai sumur-sumur baru dan hanya menyisakan sumur-sumur lama untuk digali, sehingga sumur-sumur lama tersebut semakin digali semakin dalam yang mengakibatkan minyak tercampur air dan membutuhkan alat untuk memisahkan antara minyak dan air. Hasil penelitian ini sejalan dengan Muhammad Hapsari dan deden (2018) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian sebelumnya yang tidak sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahma dan Basri (2016) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Dana Bagi Hasil Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Dari analisis data diketahui bahwa PAD, belanja modal dan dana bagi hasil migas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Hal ini diketahui dari uji F, dimana diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $24,832 > 19,35$ dengan nilai sig. $0,001 < 0,05$. Dengan meningkatnya PAD maka pembangunan akan berjalan efektif. Begitu pula dengan nilai belanja modal yang terus meningkat maka pemerintah dapat menggunakannya untuk meningkatkan aset dalam pembangunan. Selain itu adanya dana bagi hasil yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan di Aceh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dimana nilai $t_{hitung} 3,778 > t_{tabel} 1,8945$ dan $t \alpha$ sebesar $0,009 < 0,05$. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi persentase pertumbuhan ekonomi yang di capai. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan asli daerah terdiri dari berbagai pos penerimaan berupa pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah.
2. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dimana nilai $t_{hitung} -0,783 < t_{tabel} 1,8945$ dan $t \alpha$ sebesar $0,464 > 0,05$. Ini menunjukkan masih kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi daerah.
3. Dana bagi hasil migas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dimana nilai $t_{hitung} -0,682 < t_{tabel} 1,8945$ dan $t \alpha$ sebesar $0,521 > 0,05$. Penurunan perekonomian juga tidak lepas dari dilematik perekonomian global. Perlambatan perekonomian global ini disebabkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Indonesia merupakan ekspor negara tujuan terbesar. Meski begitu pertumbuhan ekonomi dibantu oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah dan investasi.
4. Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Bagi Hasil Migas secara Simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, dimana

Nilai F_{hitung} 24,832 > 19,35 dan F_{α} sebesar 0,001 < 0,05.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2018. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 10 Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta: CV, Budi Utama,)
- Abel Rinaldi. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang,
- Ahmad Yani. 2013. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,)
- AR, Rahmah dan Basri Zein. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). (Vol. 1 No. 1).
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008.
- Dewi, N. W. R., & I Dewa Gede Dharma Suputra. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi
- Fajri, A. 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. E-Journal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 5(1), 29–35.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Fahriansah, F., Safarida, N., & Midesia, S. (2023). Buy Now, Think Later: Impulsive Buying Behavior among Generation Z in Indonesia. Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 12(2), 386. <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.17453>
- Hamid, A., Mardhiah, A., & Midesia, S. (2019). Factors Influencing the Intention To Stock Investment Among Muslim Investors in Langsa. Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 8(2), 142. <https://doi.org/10.22373/share.v8i2.4679>
- Kismawadi, E. R. (2023). Contribution of Islamic banks and macroeconomic variables to economic growth in developing countries: vector error correction model approach (VECM). Journal of Islamic Accounting and Business Research, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0090>

Majid, M. S. A., Hamid, A., & Faradilla. (2017). Assessing the productivity of insurance companies in Indonesia: A non-parametric approach. *Journal of Applied Economic Sciences*, 12(6).

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>

Permendagri No.13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006).

Utami, D. N., & Indrajaya, I. G. B. (2019). The Influence of PAD and Capital Expenditures on Economic Growth and Community Welfare in Bali Province. (in Indonesian). *E- Jurnal EP Unud*, 8(10), 2195–2225.

Gregory N Mankiw, *Makroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2007)

Hakim, L. & Wijayanti, A. 2014. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1).

Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta; Salemba Empat. Hal. 42

Erlina, & Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Actual*. Medan.

Hapsari, Adinda Putri dan Deden Iskandar. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Diponegoro*. Vol 18 No 1.

Hamid, A., Majid, M. S. A., & Khairunnisah, L. (2017). An Empirical Re-Examination of the Islamic Banking Performance in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 6(2). <https://doi.org/10.6007/ijarems/v6-i2/3022>

Hamid, A., Mardhiah, A., & Midesia, S. (2019). FACTORS INFLUENCING THE INTENTION TO STOCK INVESTMENT AMONG MUSLIM INVESTORS IN LANGSA. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.22373/share.v8i2.4679>

<https://aceh.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 21 November 2021

<https://aceh.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Desember 2021

<https://acehprov.go.id> , diakses pada tanggal 07 Juli 2022

Kismawadi, E. R. (2023a). Contribution of Islamic banks and macroeconomic variables to economic growth in developing countries: vector error correction model approach (VECM). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0090>

Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

- Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)". Jurnal Akuntansi. Vol. 2, No. 2.
- Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. 2018. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Matematika Integratif, 14(2), 113-120.
- Sadono Sukirno. 2013. Mikroekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 143
- Utami, D. N., & Indrajaya, I. G. B. (2019). The Influence of PAD and Capital Expenditures on Economic Growth and Community Welfare in Bali Province. (in Indonesian). E-Jurnal EP Unud, 8(10), 2195–2225.
- Yanti, Surtika, Luluk, dan Abdul. 2021. "Pengaruh Belanja Modal, Investasi PMDN Dan Investasi PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB". Jurnal IESP Universitas Mataram. Vol 7 No 1